



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Buano No. 10, Masohi
Kode Pos: 97511

Tlp/Fax : (0914) 21329
WA: 0821 9777 8708

Email : dishub.malteng2022@gmail.com
Web : dishub.maltengkab.go.id

RENCANA AKSI KINERJA OPD (PERUBAHAN) TAHUN 2025



MASOHI
Januari 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan tuntunan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025. Rencana Aksi Kinerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran kerja.

Dalam Rencana Aksi Kinerja ini kami menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

Kami sadari bahwa penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 ini, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Masohi, Januari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



NUR ALI NURLETTE, S.E, M.Si

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19690606 199703 1 006

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Gambaran Umum.....	4
1.1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	4
1.1.2. Kedudukan.....	4
1.1.3. Tugas Pokok, Fungsi & Susunan Organisasi.....	5
BAB II RENCANA AKSI KINERJA.....	6
2.1. Program dan Sasaran Daerah, Indikator dan Target Kinerja	10
2.2. Program dan Kegiatan	19
BAB III PENUTUP	20

1.1. Gambaran Umum

Implementasi Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mensyaratkan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja, program maupun kegiatan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis OPD. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada prinsipnya merupakan variabel yang termuat dalam dokumen RENSTRA, dengan demikian RAK merupakan penjabaran sasaran yang hendak dilaksanakan setiap tahunnya.

1.1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183); Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265).

1.1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

a. Tugas Pokok

Dalam kedudukan tersebut Dinas Perhubungan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah.

b. Fungsi

Fungsi yang diemban Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Perhubungan.
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perhubungan.
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Perhubungan.
5. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati.

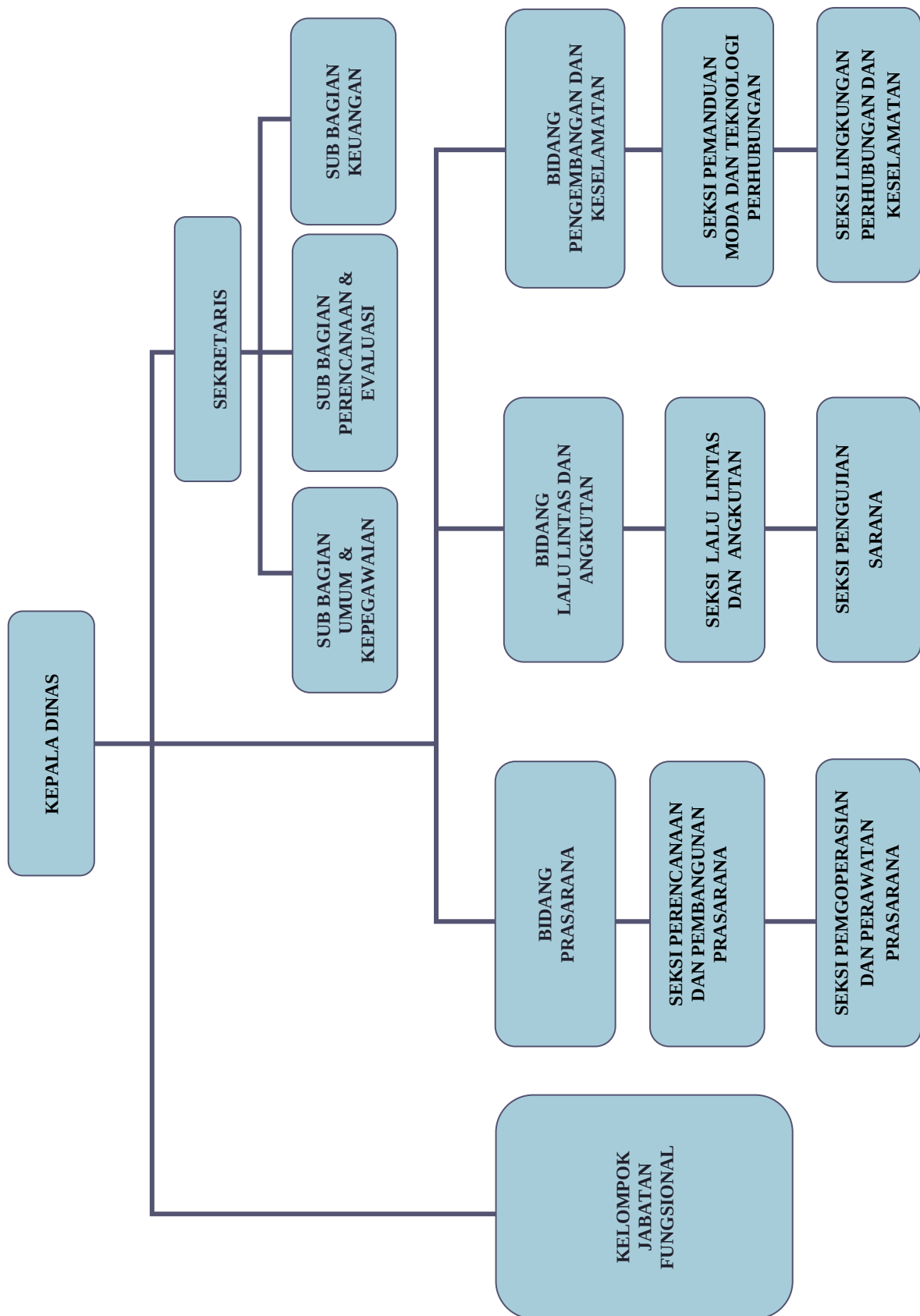
c. Susunan Organisasi

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c) Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi :
 - 1) Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - 2) Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan
 - d) Bidang Prasarana membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

- 2) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
- e) Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan membawahi :
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
 - 2) Seksi Pengujian Sarana
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan dalam bagan berikut ini :



Prosedur Kerja :

Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk penyelenggaraan tugas dibidang perhubungan dengan menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan; mengkoordinasikan perumusan perencanaan, menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang perhubungan; serta mengendalikan, membina, memantau tugas-tugas dinas secara menyeluruh.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas dalam hal : menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan; menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan pemberian dukungan teknis untuk mendukung kelancaran tugas dinas; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas supaya dapat berjalan optimal.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan dan lingkungan perhubungan serta keselamatan dalam hal menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan; menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian dan perawatan prasarana dalam hal sebagai berikut : menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan; melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Prasarana;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang prasarana; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

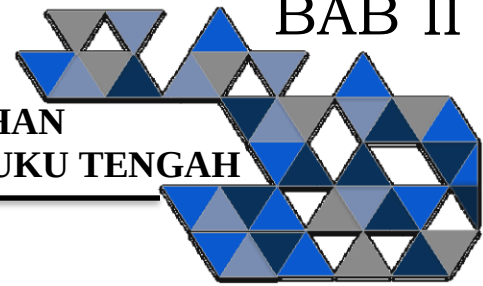
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan dan pengujian sarana, atas hal-hal sebagai berikut : menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; mengkoordinasikan penghimpun bahan dan data untuk bahan perumusan perencanaan; melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas dan Angkutan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 14 (empat belas) jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b = 3 jabatan, Eselon IV/a = 9 jabatan.

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH



2.1 Program dan Sasaran Daerah, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas perhubungan Kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan data, informasi serta distribusi informasi pembangunan daerah yang turut memperkuat daya saing daerah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.
3. Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

a. Program

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, khusus untuk Tahun 2025 didukung oleh 2 (dua) program utama sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Program Pengelolaan Pelayaran.

Selain program utama sebagaimana dimaksud terdapat pula 1 (satu) program penunjang, antara lain :

1. Program Penujuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Indikator Kinerja

Berdasarkan Dokumen RKPD serta Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah 2023 – 2026, maka indikator kinerja yang ingin dicapai dalam 4 (Empat) tahun kedepan antara lain :

1. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah, dengan indikator:
 - *Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi*
 - *Persentase Performansi Transportasi Umum*
2. Sasaran : Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, dengan indikator :
 - *Nilai SAKIP*

c. Target Kinerja

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (RENSTRA) yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun anggaran. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan seluruh indikator kinerja.

Pencapaian indikator kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 terdapat 2 (dua) Program Utama dan 1 (satu) program penunjang, yang selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Per-Triwulan Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIK	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)	Target	Satuan	Indikator Kinerja 2025				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp.)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4				Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Persentase Performansi Transportasi Umum	35,00	%				35,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
									Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	439.999.750,-				
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	240.000.000,-		1 Paket	-	-
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	49.999.750,-		12 Unit		
									Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala	15.998.000,-				
									Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15.998.000,-		1 Unit	-	-
									Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	74.999.650,-				
									Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan	Jumlah Inspeksi, dan Audit	74.999.650,-		2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan

No.	SASARAN STRATEGIK	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)	Target	Satuan	Indikator Kinerja 2025				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp.)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4				Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4
									Pemantauan Terininal	Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan					
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	58.998.950,-				
									Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang difasilitasi	58.998.950-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi							PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
									Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	334.350.000,-				

No.	SASARAN STRATEGIK	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)	Target	Satuan	Indikator Kinerja 2025				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp.)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4				Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4
									Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	334.350.000,-		2 Unit		-
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP	A					A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.149.610.150,-				
									Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN	4.963.272.400,-	59 Orang/Bulan			
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.517.850,-	2 Dokumen	-	-	-
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	9.819.900,-	2 Lapoaran	-	-	-
									Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah	1.122.314.000,-				
									Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1.122.314.000,-	14 Laporan			

No.	SASARAN STRATEGIK	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)	Target	Satuan	Indikator Kinerja 2025				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp.)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4				Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.999.800,-				
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.999.850,-	2 Dokumen	-	-	-
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.536.000,-				
									Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	31.250.000,-		4 Paket	-	-
									Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,-	2 Dokumen	-	-	-
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.285.000,-	2 Laporan	-	-	-
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	111.702.000,-				
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	3.300.000,-	1 Laporan	-	-	-
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.400.000,-	3 Laporan	-	-	-

No.	SASARAN STRATEGIK	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)	Target	Satuan	Indikator Kinerja 2025				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp.)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4				Triw.1	Triw.2	Triw.3	Triw.4
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.002.000,-	2 Laporan	-	-	-
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	150.005.000,-				
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	49.031.000,-	1 unit			
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8.800.000,-	9 Unit			
									Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	48.000.000,-	10 Unit			
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	44.173.540,-	1 Unit			
JUMLAH TOTAL											7.546.512.300,-				

2.2. Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025 atas dasar pencapaian sampai dengan Tahun 2024 sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 . Program Dan Kegiatan Tahun 2025

No.	SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN				K E T
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Persentase Performansi Transportasi Umum	35	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Paket	1	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	12	
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala			
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	5	
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek			
						- Fasilitas pemenuhan	- Jumlah Dokumen Izin	Laporan	3	

No.	SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN				K E T
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	
						persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang difasilitasi			
		Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	90,4	%	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian			
						- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	2	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	A	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
						Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/ Tahun	59	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang didata dan dikelola	Laporan	14	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	

No.	SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN				K E T
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	
						dan Konsultasi SKPD				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	2	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Unit	1	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	9	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	10	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	

BAB III

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini diharapkan :

1. Mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif sesuai dengan tujuan serta sasaran indicator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai.
2. Mampu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan, pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.
3. Tercapainya Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan perencanaan yang matang serta diperlukan etos kerja yang tinggi.
4. Meningkatkan efektifitas peran pemerintah daerah dan dapat menampung partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Demikian Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, semoga bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.